

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan dunia usaha yang begitu pesat seperti sekarang ini, banyak perusahaan berdiri di berbagai macam sektor ekonomidan tentunya dikelola secara profesional untuk dapat bertahan dan berkelanjutan. Pihak manajemen memiliki tanggung jawab untuk mengadopsi kebijakan akuntansi yang baik, menyelenggarakan pengendalian internal yang memadai dan menyajikan laporan keuangan yang wajar.

Laporan keuangan merupakan hal yang penting bagi perusahaan, terutama bagi perusahaan yang menerbitkan saham-sahamnya secara luas di pasar modal (*go public*), dimana penerbitan saham secara tidak langsung memberikan hak kepada publik untuk dapat mengetahui segala informasi yang berkaitan dengan perusahaan tersebut. Oleh sebab itu, diperlukan jasa penjaminan dari pihak ketiga yang independen untuk memberikan keyakinan bahwa laporan keuangan yang disajikan pihak manajemen bebas dari salah saji yang material yang menyesatkan sehingga dapat dipercaya dan diandalkan sebagai dasar dalam pembuatan keputusan bisnis. Jasa penjaminan yang umum digunakan untuk memperbaiki kualitas informasi bagi pengguna laporan keuangan adalah jasa audit auditor independen dan laporan keuangan oleh kantor akuntan publik.

Peraturan BAPEPAM Nomor Kep- 36/PM/2003 tentang Penyampaian Laporan Keuangan Berkala Emiten atau Perusahaan Publik dan Peraturan Pencatatan Bursa Efek Indonesia Nomor Kep-306/BEI/07-2004 tentang Kewajiban Penyampaian Informasi menyebutkan bahwa perusahaan yang *go public* diwajibkan menyampaikan laporan keuangan yang disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Keuangan (SAK) dan telah diaudit oleh akuntan publik.

Untuk mencegah terjadinya kasus kegagalan audit, maka auditor dituntut untuk bersikap profesional. Sikap profesionalisme auditor dapat dicerminkan oleh ketepatan auditor dalam membuat *judgment* dalam penugasan auditnya. Standar Professional Akuntan Publik (SPAP) pada seksi 341 menyebutkan bahwa *audit judgment* atas kemampuan kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya, harus berdasarkan pada ada tidaknya kesangsian dalam diri auditor itu sendiri terhadap kemampuan suatu kesatuan usaha dalam mempertahankan kelangsungan hidupnya dalam periode satu tahun sejak tanggal laporan keuangan auditan.

Dalam menjalankan proses audit seorang auditor akan memberikan pendapat dengan *judgment* berdasarkan kejadian-kejadian yang dialami oleh suatu kesatuan usaha tersebut pada masa lalu, masa kini, dan di masa yang akan datang (Jamilah *et.al.*, 2007). *Judgment* merupakan kegiatan yang selalu digunakan auditor dalam setiap proses audit, untuk itu auditor harus terus mengasah *judgment* mereka. Tepat atau tidaknya *judgment* auditor akan sangat menentukan kualitas dari hasil audit dan juga opini yang akan dikeluarkan oleh auditor. Selain itu, tingkat kepercayaan publik terhadap profesi auditor ini tentunya juga

ditentukan apakah auditor dapat memberikan *judgment* yang tepat dan akurat. Kualitas dari *judgment* ini akan menunjukkan seberapa baik kinerja seorang auditor dalam melakukan tugasnya (Nadhiroh, 2010).

Didalam melaksanakan audit terdapat kemungkinan akan terjadinya suatu gagal audit seperti kasus besar yang terjadi di Amerika Serikat yaitu kasus Enron yang terjadi di Amerika Serikat. Idris (2012) menyatakan kasus Enron tersebut disebabkan karena manajemen Enron telah melakukan *window dressing* dengan memanipulasi angka-angka laporan keuangan agar kinerjanya terlihat baik. Dalam hal ini, pendapatan dinaikkan sebesar US \$ 600 juta dan dengan teknik off-balance sheet utang senilai US \$ 1,2 milyar disembunyikan. Auditor Enron, Arthur Andersen, juga ikut disalahkan karena kasus gagal audit ini. Dalam PSA No 1 (SA 150) disebutkan dalam Standar Pekerjaan Lapangan No.1 disebutkan bahwa dalam melakukan pekerjaan, perencanaan sebaik-baiknya harus dilakukan. Didalam melaksanakan pekerjaan audit, professional judgment pasti dilakukan pada semua proses audit baik dalam tahap perencanaan maupun supervisi.

Di Indonesia manipulasi laporan keuangan terjadi pada PT Kimia Farma. Pada audit tanggal 31 Desember 2001, manajemen Kimia Farma melaporkan adanya laba bersih sebesar Rp 132 milyar, dan laporan tersebut di audit oleh Hans Tuanakotta & Mustofa (HTM). Akan tetapi, Kementerian BUMN dan Bapepam menilai bahwa laba bersih tersebut terlalu besar dan mengandung unsur rekayasa. Setelah dilakukan audit ulang, pada 3 Oktober 2002 laporan keuangan Kimia Farma 2001 disajikan kembali (*restated*), karena telah ditemukan kesalahan yang cukup mendasar. Kesalahan penyajian yang berkaitan dengan persediaan timbul

karena nilai yang ada dalam daftar harga persediaan digelembungkan. PT Kimia Farma, melalui direktur produksinya, menerbitkan dua buah daftar harga persediaan (*master prices*) pada tanggal 1 dan 3 Februari 2002. Daftar harga per 3 Februari ini telah digelembungkan nilainya dan dijadikan dasar penilaian persediaan pada unit distribusi Kimia Farma per 31 Desember 2001.

Terhadap auditor eksternal yang mengaudit laporan keuangan PT KF per 31 Desember 2001, Bapepam menyimpulkan auditor eksternal telah melakukan prosedur audit sampling yang telah diatur dalam Standar Profesional Akuntan Publik, dan tidak ditemukan adanya unsur kesengajaan membantu manajemen PT KF menggelembungkan keuntungan. Bapepam mengemukakan proses audit tersebut tidak berhasil mengatasi resiko audit dalam mendeteksi adanya penggelembungan laba yang dilakukan PT KF. Atas temuan ini, kepada PT KF Bapepam memberikan sanksi administratif sebesar Rp 500 juta, Rp 1 milyar terhadap direksi lama PT KF dan Rp 100 juta kepada auditor eksternal (Bapepam 2002).

Tindak kekeliruan yang belum lama ini terjadi pada PT. Katarina Utama Tbk (Rina) pada tahun 2010 yang sudah diberikan peringatan tertulis I oleh pihak Bursa Efek Indonesia terkait dugaan penyelewengan dana IPO, penggelembungan asset perseroan dana IPO sebesar Rp. 33,6 miliar pada penawaran Juli 2009 dimana pada kenyataannya tidak ada realisasi yang signifikan dalam pembelian peralatan modal kerja serta penambahan kantor cabang.

Sebelum melakukan IPO, PT. Katarina Utama diduga telah mempercantik laporan keuangan 2008. Dalam dokumen laporan keuangan ada kenaikan asset 10

kali lipat dan ekuitas perseroan naik 16 kali lipat. Dugaan penyelewengan tersebut dipicu oleh laporan keuangan perseroan yang menunjukkan angka-angka yang tidak normal. Pada 2010 jumlah asset terlihat menyusut drastic sebanyak 74,5% ekuitas pun anjlok 79,1%.

Menurut Eddy Sugito Direktur Penilaian Perusahaan BEI, pihaknya telah berkali-kali memanggil manajemen Rina, terutama Direktur Utama yaitu Fazli bin Zainal Abidin. Dari seluruh manajemen Rina yang ekspatriat asal Malaysia, hanya tersisa Direktur Keuangan Izzudin Mahmood yang di Indonesia, sedangkan Fazli dan jajaran direksi diduga telah melarikan diri ke Malaysia (Qomariyah, 2006).

Meskipun belum ada pernyataan dari OJK mengenai keterlibatan pihak yang mengaudit laporan keuangan 2008, namun kuat dugaan adanya keterlibatan pihak auditor. Hal ini karena hasil audit yang dikeluarkan KAP Budiman, Wawan, Pamudji dan Rekan justru menyatakan opini wajar padahal ada dugaan laporan keuangan telah dimanipulasi. Keterlibatan pihak auditor semakin kuat setelah KAP Akhyadi Wadisono melakukan audit atas laporan keuangan 2010 dan member opini disclaimer karena tidak dapat melakukan konfirmasi atas transaksi yang ada.

Dampak dari kasus ini pada 1 September 2010 saham PT. Katarina Utama Tbk (Rina) disuspensi oleh Bursa Efek Indonesia. Audit yang dilakukan oleh KAP Akhyadi Wadisono memberikan opini disclaimer selama tahun 2010 dan 2011. Tanggal 1 Oktober 2012 otoritas bursa memberikan sanksi administrative dan melakukan delisting atas saham.

Hingga pada tahun 2012 ketika Bapepam LK telah berubah menjadi OJK kasus ini belum terselesaikan secara tuntas. Anggota Dewan Komisiner OJK Nurhaida mengatakan bahwa, “Kasus-kasus yang sedang berjalan akan terus dilanjutkan ke OJK. Memang sebaiknya kasus-kasus tersebut diselesaikan agar tidak terlalu banyak di OJK.” Beliau melanjutkan emiten-emiten yang sedang bermasalah antara lain PT. Katarina Utama Tbk (Rina) dan PT. Davomas Abadi Tbk (Davo) (Ma’ruf 2012).

Selain beberapa kasus diatas mengenai *audit judgment* seperti yang dijelaskan diatas, terdapat penelitian terdahulu yang meneliti hubungan antara tekanan ketaatan terhadap *audit judgment* yang menunjukkan hasil berbeda-beda. Seperti penelitian Jamila, Fanani, dan Chandrarin (2007),Wijayanti (2010), Praditaningrum (2012), Yuliani (2012), Putri dan Laksito (2010) yang menunjukkan hasil penelitian bahwa tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgment*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Fitriani dan Daljono (2012) menunjukkan hasil sebaliknya yaitu tekanan ketaatan tidak berpengaruh terhadap *audit judgment*.

Beberapa penelitian terdahulu lainnya juga dilakukan untuk meneliti hubungan antara independensi terhadap *audit judgment* yang menunjukan hasil berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Justiana (2010) yang menunjukkan hasil bahwa independensi berpengaruh pada *audit judgment*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Yuliani (2012), dan Kautsar Rahmelia (2013) menunjukkan hasil bahwa independensi tidak berpengaruh pada *audit judgment*.

Adapun beberapa penelitian terdahulu lainnya juga dilakukan untuk meneliti hubungan antara kompleksitas tugas terhadap *audit judgment* yang menunjukkan hasil berbeda-beda. Seperti penelitian yang dilakukan oleh Jamila, Fanani, dan Chandrarin (2007), Yuliani (2012), dan Fitriani dan Daljono (2012) yang menunjukkan hasil bahwa kompleksitas tugas berpengaruh pada *audit judgment*. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Zulaikha (2010), Praditaningrum (2012) menunjukkan hasil bahwa kompleksitas tugas tidak berpengaruh pada *audit judgment*.

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya yaitu sampel penelitian ini adalah auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik Kota Jakarta Timur. Sementara penelitian yang dilakukan oleh Jamilah, Fanani dan Chandrarin (2007) mengambil sampel yaitu auditor yang bekerja pada Kantor Akuntan Publik di Jawa Timur. Oleh karena itu terdapat beberapa kasus yang berkaitan dengan *audit judgment* serta perbedaan hasil dari beberapa penelitian terdahulu, maka penulis tertarik meneliti tentang **“Pengaruh tekanan ketaatan, independensi, dan kompleksitas tugas terhadap *audit judgment* (Survey pada Auditor di Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur).”**

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, penulis mengidentifikasi masalah pada penelitian ini, yaitu:

1. Terjadi penurunan kepercayaan masyarakat terhadap profesi auditor disebabkan oleh banyaknya kasus manipulasi dan skandal keuangan yang melibatkan auditor dan Kantor Akuntan Publik;
2. Salah satu penyebab kegagalan audit terjadi karena auditor tidak mempunyai kompetensi, independensi dan akuntabilitas yang memadai sehingga auditor tidak bisa memutuskan atau menentukan sejauh mana tingkat keakuratan dan kebenaran bukti-bukti maupun kebenaran informasi yang diberikan oleh klien;
3. Tidak digunakannya sikap kompetensi, independensi dan akuntabilitas oleh auditor menyebabkan auditor gagal dalam mendeteksi kecurangan sehingga laporan audit yang dihasilkan oleh auditor tidak terjamin kualitasnya;
4. Auditor yang kurang berpengalaman cenderung memiliki tingkat kompetensi yang kurang memadai dalam memandang dan menanggapi suatu bukti yang diperoleh selama melakukan pemeriksaan;
5. Keahlian dan pelatihan teknis yang kurang memadai membuat auditor cenderung kurang peka dalam menganalisis laporan keuangan, dalam hal ini banyak auditor tidak menerapkan prosedur untuk mengenal, menilai, dan menanggapi risiko salah saji yang material, misalnya yang timbul akibat hubungan istimewa (*related party transactions*);
6. Auditor sering kali menerima begitu saja penilaian manajemen. Auditor juga sering menerima begitu saja penilaian auditor lain. Sehingga hal ini mengindikasikan kurangnya sikap independensi yang dimiliki auditor;

7. Banyak auditor tidak melakukan audit *planning* dengan baik, banyak dokumentasi yang diperlukan tidak disiapkan. Bahkan, meskipun proses audit dilakukan benar, dokumentasi yang seharusnya mendukung hasil audit tersebut, tidak lengkap. Banyak auditor tidak berupaya mendeteksi manipulasi (*fraud*). Hal ini mengindikasikan kurangnya sikap akuntabilitas yang dimiliki oleh auditor;
8. Tingginya kebutuhan masyarakat akan informasi keuangan yang handal meningkatkan kebutuhan akan akuntan publik, tetapi peningkatan tersebut tidak diimbangi dengan peningkatan kualitas audit dari profesi tersebut;
9. Terdapat beberapa kasus di dunia pada umumnya serta di Indonesia pada khususnya yang berkaitan dengan kualitas audit sehingga menambah kejelasan mengenai pentingnya pelaksanaan audit yang berkualitas;
10. Terdapat beberapa hasil penelitian terdahulu yang meneliti tentang *audit judgment* yang menunjukkan hasil yang berbeda-beda sehingga peneliti tertarik untuk meneliti lebih lanjut tentang *audit judgment*.

C. Pembatasan Masalah

Dari berbagai masalah yang diidentifikasi di atas, penelitian ini dibatasi pada masalah “**Pengaruh tekanan ketaatan, independensi, dan kompleksitas tugas terhadap *audit judgment*.**” (Survey pada Auditor di Kantor Akuntan Publik di Jakarta Timur)”. Hal ini bertujuan untuk kemudahan akses, menghemat biaya serta keterbatasan waktu penelitian.

D. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dijelaskan diatas, peneliti mencoba untuk merumuskan pertanyaan penelitian sebagai berikut.

1. Apakah tekanan ketaatan berpengaruh terhadap *audit judgment*?
2. Apakah independensi berpengaruh terhadap *audit judgment*?
3. Apakah kompleksitas tugas berpengaruh terhadap *audit judgment*?

E. Kegunaan penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi perusahaan, penelitian ini dapat memberikan masukan dan tambahan informasi bagi auditor di kantor akuntan *public* mengenai faktor – faktor yang dapat mempengaruhi penilaian audit atau *audit judgment*. Sehingga dalam memberikan penilaian dapat obyektif.
2. Bagi akademis, memberikan tambahan bukti empiris pada literatur akuntansi, khususnya mengenai pengaruh tekanan ketaatan, independensi, kompleksitas tugas berkaitan dengan *audit judgment*.
3. Dapat memberikan tambahan gambaran tentang dinamika yang terjadi di Kantor Akuntan Publik khususnya auditor dalam membuat *audit judgment*.
4. Bagi peneliti selanjutnya, sebagai sumber informasi dan referensi untuk memungkinkan penelitian selanjutnya dengan topik ini akan tetap mendukung hasil dari penelitian sebelumnya atau bahkan dapat memberikan hasil yang berbeda.

5. Dapat menambah kontribusi untuk Kantor Akuntan Publik agar lebih baik dalam pengembangan *judgment* yang tidak bertentangan dengan standar professional.